

SKRIPSI

**KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT
DI PERBATASAN INDONESIA DAN PAPUA NUGINI
TAHUN 2019-2020**



OLEH:

ADI PRATAMA DJADI
NIM :117150008T

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2021


HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

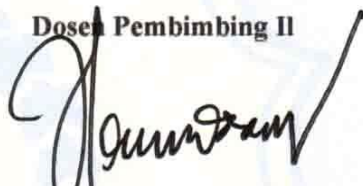
**KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI PERBATASAN INDONESIA
DAN PAPUA NUGINI TAHUN 2019-2020**

Telah memenuhi syarat dan disetujui
Tanggal, 2021

Dosen Pembimbing I




Ahmad Afandi, S.S., M.Pd.
NIDN : 0819038401

Dosen Pembimbing II


Ilmiawan Mubin, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 0811108504

Menyetujui:

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**


Ketua Program Studi,

Ahmad Afandi, S.S., M.Pd.
NIDN : 0819038401

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI PERBATASAN INDONESIA
DAN PAPUA NUGINI PADA TAHUN 2019-2020

Skripsi atas nama Adi Pratama Djadi telah dipertahankan di depan dosen Penguji Program
Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram

Tanggal, 2021

Dosen Penguji

1. Ahmad Afandi, S.S., M.Pd
NIDN. 0819038401

(Ketua)



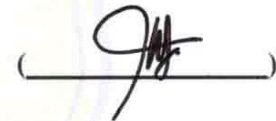
2. Rosada, M.Pd
NIDN. 0821028401

(Anggota)



3. Dian Eka Mavasari, M.Pd
NIDN. 0830098802

(Anggota)



Mengesahkan:

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Dekan,



Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd.Si.
NIDN.0821078501

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.

NAMA : ADI PRATAMA DJADI

NIM : 117150008T

Menyatakan bahwa Skripsi yang "*Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Perbatasan Indonesia dan Papua Nugini Pada Tahun 2019-2020*" adalah hasil karya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang ditulis atau ditribitkan orang lain kecuali sebagai acuan dan dikutip dengan mengikuti tata penulis karya ilmiah yang lazim. Apabila ternyata terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa rekayasa dari pihak manapun.

Mataram, 2021

Yang membuat pernyataan



ADI PRATAMA DJADI

NIM. 117150008T



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A.-Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADI PRATAMA DJADI
NIM : 117150008T
Tempat/Tgl Lahir : TAMEMING 07-08-1997
Program Studi : PENDIDIKAN SESARAH
Fakultas : FKIP
No. Hp : 082350100719
Email : pramatadadi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi KTI/Tesis* saya yang berjudul :

KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI PERBATASAN
INDONESIA DAN PAPUA NUGINI PADA TAHUN 2019-2020

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 38%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 31 JANUARI2022

Penulis



ADI PRATAMA DJADI
NIM. 117150008T

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADI PRATAMA DJADI
NIM : 117150008T
Tempat/Tgl Lahir : JAMEMING 07-08-1997
Program Studi : PENDIDIKAN SEBARAH
Fakultas : FKIP
No. Hp/Email : 082 359100 719 / pratamadsadi
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI PERBATASAN
INDONESIA DAN PAPUA NUSINI PADA TAHUN 2019-2020

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 31 JANUARI 2022

Penulis



ADI PRATAMA DJADI

NIM. 117150008T

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.

NIDN. 0802048904

MOTTO

**“Lakukan apa yang membuatmu senang,
selain itu lupakan”**

(Booz Djadi)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobil'alamin, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam penyelesaian Skripsi ini. Dengan ketulusan hati dan rasa senang yang terdalam, karya ini saya persembahkan untuk :

1. Almarhumah Ibunda Tercinta Nurmiyati Bapang yang telah memberikan kasih sayang serta tulus menyayangi dengan sepenuh hati sampai ananda sebesar ini dan juga Ayahanda Tercinta Sumardi Djadi, Terimakasih telah memberikan kasih sayang yang tulus dan selalu memberikan Do'a untuk ananda, kalian adalah malaikat dalam kehidupan yang memberi semangat dalam menghadapi segala bentuk cobaan yang datang sili berganti.
2. Ibunda Siti Nurmiati Syukur dan Ayahanda Ibnu Rusdi Djadi, S.Pd.i Tersayang, Terimakasih banyak telah memberikan kasih sayang yang tulus kepada ananda dan telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materil, kalian adalah malaikat bagi ananda dalam kehidupan, yang selalu memberikan semangat dalam menghadapi semua cobaan yang ada.
3. Kakek, Nenek, Paman, Bibi, Kakak, Adikku tersayang serta seluruh keluarga yang selalu mendukung, memberikan motivasi buat ananda sehingga telah berada pada posisi sekarang ini.
4. Keluarga besar FKMA-NTT Mataram Tercinta , yang telah menemani hari-hari baik suka maupun duka tetapi tetap menyenangkan di Mataram selama ini.
5. Keluarga Besar MENWA Satuan 903 Jala Pamungkas UMMat di hati, yang telah banyak memberikan Ilmu yang bermanfaat bagi diri ananda serta selalu memberikan kenyamanan dan motivasi dalam organisasi maupun akademisi.
6. Sahabat FKIP-Program Studi Pendidikan Sejarah angkatan 2016 terimakasih atas persahabatan yang tulus dari kalian semua.

7. Keluarga besar kos-kosan Lorong Pembebasan yang selalu memberikan warna dan aura positif bagi kehidupan sehari-hari.
8. Almamaterku tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang maha Esa atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya saya bisa menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul *“Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Perbatasan Indonesia dan Papua Nugini Pada Tahun 2019-2020”* dan tidak lupa saya haturkan solawat serta salam kepada junjungan Alam Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah menyebarkan agama islam sampai kepenjuru dunia dan taklupa pula saya haturkan salam kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa, tidak ada manusia yang tak memiliki kesalahan oleh karena itu penulis menyadari bahwa Skripsi yang disusun masih jauh dari kata kesempurnaa, baik dari teknis dan penulisan. Penulis berharap keritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan penyempurnaan berikutnya.

Dengan selesainya skripsi ini, maka penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesanya-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Drs. H. Arsyad Abdul Gani. M.Pd.
2. Ayahanda Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd.Si. Selaku Dkan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram, dosen pengajar dan staf pegawai di lingkungan FKIP UMMat, atas segala ilmu, bimbingan dan bantuan yang di berikan kepada penulis selama berada di Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ayahanda Ahmad Afandi, S.S., M.Pd. selaku ketua Program Studi Pendidikan Sejarah.

4. Ayahanda Ahmad Afandi, S.S., M.Pd. dan Ayahanda Ilmiawan Mubin, S.Pd., M.Pd. selaku dosen pembimbing I dan II terimakasih atas keiklasan dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung telah turut serta membantu dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini. Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Mataram, 2021

ADI PRATAMA DJADI
117150008T

Adi Pratama Djadi, 117150008T. **Kondisi Sosial Ekonomi di Perbatasan Indonesia dan Papua Nugini Tahun 2019-2020**. Skripsi. Mataram : Universitas Muhammadiyah Mataram

Pembimbing I : Ahmad Afandi, SS.,M.Pd
Pembimbing II : Ilmiawan Mubin, M.Pd

ABSTRAK

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Indonesia dan Papua Nugini di Perbatasan pada tahun 2019-2020. metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan Historis.

Hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa, Indonesia dan Papua Nugini memiliki masing-masing wilayah perbatasan yang dapat mengembangkan perekonomiannya .Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih memprihatinkan, terutama dalam mengakses kebutuhan (pendidikan,kesehatan)., Kebijakan pembangunan (Lokal, regional, Nasional) yang tidak berpihak pada masyarakat lokal. perbatasan sudah menjadi masalah yang bahkan belum menemukan titik terang sampai sekarang. Masalah yang sering di hadapi ialah tentang Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Perbatasan antara Indonesiaia dan Papua Nugini. ini mengetahui bagaimana otonomi khusus daerah perbatasan bisa menjadi alternatif sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah daerah perbatasan. Secara umum kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat wilayah perbatasan adalah minimnya aksesibilitas sosial dan ekonomi mereka, di tambah lagi Pembangunan fisik infastruktur yang belum memadai. Integrasi perencanaan, regulasi, kelembagaan dan pembiayaan pembangunan harus berjalan sinergis yang melibatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Upaya pemerintah dalam menangani masalah yang terjadi di wilayah perbatasan untuk Pendekatan yang di butuhkan bersifat ganda, yakni pendekatan Sosial (Mempererat tali persaudaraan di wilayah perbatasan pada tahun 2019-2020, terutama pada Aspek Sosial yang di jalankan selama ini) dan pendekatan kesejahtraan (model pemberdayaan dan strategi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perbatasan perlu mendapatkan perlakuan khusus mengingat perannya sebagai batas dengan negara tetangga.

Kata kunci : Sosial, Ekonomi, Perbatasan Indonesia, Papua Nugini

Adi Pratama Djadi, 117150008T. **Socio-Economic Conditions at the Border of Indonesia and Papua New Guinea in 2019-2020**. Thesis. Mataram : Muhammadiyah University of Mataram

First Consultant : Ahmad Afandi, SS., M.Pd
Second Consultant : Scientist Mubin, M.Pd

ABSTRACT

This research aims to establish the socioeconomic status of Indonesian and Papua New Guineans living on the border in 2019-2020. A literature review with a historical approach was employed as the method. According to experts' data analysis findings, Indonesia and Papua New Guinea have border areas that can help them build their economies. The neighborhood's socioeconomic situations remain challenging, particularly in accessing basic requirements (education, health) and development strategies (local, regional, and national) that do not benefit the residents. Borders have evolved into a problem that has only recently become apparent. The socioeconomic situation of the community on the Indonesia-Papua New Guinea border is a frequent source of concern. This study investigates how special autonomy for border areas can address border issues. In general, the lack of social and economic accessibility and inadequate physical infrastructure development contribute to the poverty and backwardness of people living in border areas. The government, the corporate world, and the community must integrate planning, rules, institutions, and development financing. The government's efforts in dealing with problems that arise in border areas for the required approach are dual, namely the social approach (Strengthening brotherhood in border areas in 2019-2020, particularly in the Social Aspects that have been carried out thus far) and the welfare approach (the empowerment model and strategies to improve people's living standards). Because of their significance as borders with other countries, borders require specific attention.

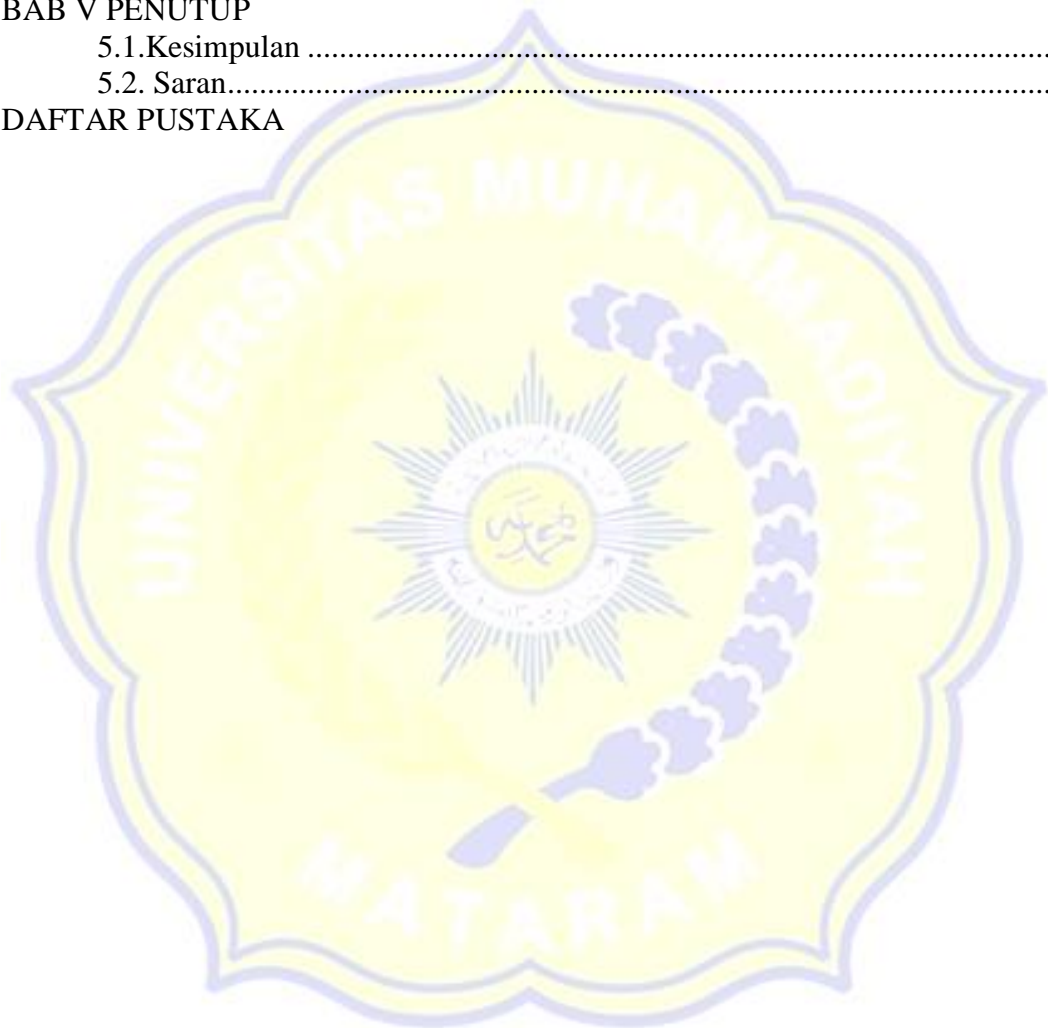
Keywords: Social, Economic, Indonesian Border, Papua New Guinea



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HELANAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoretis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	10
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Konsep Umum Tentang Indonesia.....	11
2.2. Konsep Umum Tentang Papua Nugini	14
2.3. Perbatasan Antar Negara	17
2.3.1. Definisi Perbatasan.....	17
2.3.2 Perbatasan Indonesia-Papua Nugini.....	20
2.4. Kondisi Sosial Ekonomi.....	22
2.4.1. Pengertian Sosial.....	24
2.4.2 Pengertian Ekonomi.....	25
2.5. Pengertian Masyarakat	26
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	29
3.2. Metode Historis	30
3.3. Batasan Temporal.....	35
3.4. Data dan Sumber Data	35
3.5. Analisis Data	36
3.6. Keabsahan Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil dan Pembahasan Penelitian	40
4.1.1 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Indonesia Dan Papua Nugini Di Perbatasan Pada Tahun 2019- 2020.	40
4.1.2 Kondisi Sosial	42
4.1.3 Kondisi Ekonomi	50
4.1.4 Kekuatan	51
4.1.5 Kelemahan	52

4.2 Upaya pemerintah Indonesia dan Papua Nugini dalam menangani kondisi sosial ekonomi di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini pada tahun 2019-2020	54
4.2.1 Upaya Pemerintah Indonesia Dan Papua Nugini Dalam Menangani Kondisi Sosial Masyarakat Di Perbatasan.....	60
4.2.2 Upaya Pemerintah Indonesia Dan Papua Nugini Dalam Menangani Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Perbatasan.....	62
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	66
5.2. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tingkat intensitas arus lalu lintas orang, produk, dan jasa yang tinggi diperlukan untuk pengembangan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berdasarkan ciri kawasan perbatasan. Hadirnya berbagai persoalan di kawasan perbatasan menjadi penghambat kemampuan kawasan tersebut untuk tumbuh dan berkembang. Masalah yang dapat timbul berupa koordinasi antar instansi, sehingga sulit untuk menjalin kerjasama antar pihak yang menangani masalah perbatasan; Selain itu, masalah infrastruktur dan hukum tidak diragukan lagi merupakan masalah tambahan yang harus dipertimbangkan sebagai tantangan dalam mengembangkan kawasan perbatasan.

Bagi pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), kebangkitan otonomi daerah telah menawarkan kemungkinan sekaligus masalah, karena mereka didorong untuk lebih proaktif dan inovatif dalam pembangunan daerahnya masing-masing. Pembangunan daerah yang dulunya terpusat (top down) sekarang menjadi desentralisasi/otonom, dan kerjasama internasional antar kota yang dilakukan oleh daerah dapat menjadi inovasi atau alternatif upaya mencapai efisiensi dan efektivitas serta saling menguntungkan dalam pembangunan daerah yang sebelumnya terpusat (top down) (bottom up). Namun, penting untuk diingat bahwa pemerintah daerah, bekerja sama dengan pemerintah pusat, bertanggung jawab untuk menangani masalah perbatasan dan memastikan bahwa perbatasan luar Indonesia dikelola dengan benar dan efektif (Kamil Melda, 2007).

Memang benar bahwa pembentukan dan pelaksanaan hubungan baik antara negara yang berdekatan diperlukan untuk menghindari perselisihan antara kedua negara tetangga. Selain itu, dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di

wilayah perbatasan, serta dengan memajukan daerah dan memanfaatkan potensi yang ada, dapat mengurangi terulangnya kesulitan di daerah di masa mendatang. Selama bertahun-tahun sebelumnya, tren militeristik menjadi instrumen utama dalam pengelolaan wilayah perbatasan negara. Akibatnya, mekanisme pengelolaan kawasan perbatasan negara dengan pendekatan prioritas kerjasama internasional di bidang ekonomi dan sosial antara dua negara yang berbatasan hanya sedikit ditemui, padahal dianggap lebih mencerminkan kondisi humanistik di kawasan perbatasan negara.

Hampir semua wilayah yang berbatasan dengan Indonesia dan Papua Nugini belum berkembang, dan situasinya cukup mengkhawatirkan jika dilihat dari kaca mata negara asing seperti Amerika Serikat. Oleh karena itu, mengingat pentingnya kawasan perbatasan bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pengelolaan kawasan perbatasan saat ini lebih mengutamakan pendekatan keamanan (*safety first approach*), sehingga pembangunan sosial ekonomi terabaikan. Tujuannya di sini adalah untuk mengupas masalah kawasan perbatasan secara lebih mendalam sekaligus mengajukan beberapa rekomendasi kebijakan kepada pemerintah Indonesia. Selain mempertimbangkan perlunya perhatian lebih terhadap wilayah perbatasan, strategi ini mendorong peningkatan koordinasi tindakan, baik oleh pemerintah maupun pihak lain.

Pengembangan modal sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan (termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas) harus diimbangi dengan pengembangan sumber daya manusia di wilayah tersebut. Sementara itu, sistem dan pola pengelolaan perbatasan darat dan laut, serta pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam, harus dirancang untuk mencapai pertumbuhan kawasan perbatasan yang berkelanjutan. Wilayah perbatasan Indonesia dicirikan terutama oleh dua kejadian kunci. Salah satu kriteria tersebut adalah bahwa tinggal di wilayah perbatasan masih relatif

terkendala dari segi sosial ekonomi, budaya, dan situasi keamanan. Dua hal yang perlu disinggung adalah kondisi pengelolaan perbatasan negara-negara tetangga Indonesia saat ini yang masih memerlukan penataan dan administrasi yang lebih luas karena tantangan dan ketidaksepakatan yang terus berlanjut mengenai penetapan batas wilayah antar negara.

Daerah perbatasan belum mendapat perhatian dan perlakuan yang substansial, belum dioptimalkan dan terintegrasi, serta menjadi sasaran berbagai kelompok dan organisasi kepentingan sektoral maupun horizontal. Alasan utama tertinggalnya kawasan perbatasan adalah jarak antara mereka dan ibu kota negara, serta kurangnya perhatian dari pemerintah pusat, yang menekankan pembangunan di daerah berpenduduk padat dengan akses mudah dan cepat serta lokasi yang menjanjikan. Akibatnya, daerah perbatasan memiliki infrastruktur, fasilitas, dan utilitas yang sangat terbatas, perumahan dan permukiman tidak praktis, dan akibatnya populasi sangat langka. ("Rekaman kunjungan kerja komisi II Mestariany Habie ke perbatasan RI-PNG di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua" adalah contoh yang baik. Inilah beberapa variabel yang berkontribusi terhadap kesulitan perbatasan.

Penetapan batas wilayah Indonesia dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia belum final dengan kepuasan semua pihak yang terlibat. Hanya wilayah perbatasan dengan Australia dan Papua Nugini yang berhasil ditangani dari semua tempat yang berbatasan dengannya. Akibatnya, mengingat luas dan banyaknya perbatasan Indonesia, tidak menutup kemungkinan akan muncul berbagai permasalahan lintas batas di kemudian hari, karena faktor-faktor permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, serta fakta bahwa garis perbatasan tidak dapat ditentukan melalui klaim atau pengakuan sepihak suatu negara, melainkan melalui kesepakatan yang terjadi antar negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia.

Wilayah perbatasan dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk membandingkan tingkat kemakmuran antara dua negara yang memiliki batas yang sama satu sama lain. Karena memiliki tujuan yang berbeda, hal ini sering menimbulkan konflik antar penduduk kedua negara. Misalkan negara tetangga seperti Malaysia memiliki ekonomi yang lebih maju daripada penduduk Indonesia yang tinggal di seberang garis perbatasan dengan Malaysia. Kesenjangan dalam situasi sosial-ekonomi dapat memiliki berbagai konsekuensi negatif, yang sebagian besar bersifat merugikan. Eksploitasi sumber daya alam oleh negara tetangga tanpa kompensasi dan tanggung jawab yang memadai dapat mengakibatkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan, serta terganggunya kehidupan orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. Di sisi lain, ada wilayah perbatasan tertentu di Indonesia yang sangat bergantung pada kegiatan ekonomi negara tetangga yang terletak di kedua sisi perbatasan antara kedua negara (Kurnia, Dkk 2006:50).

PNG merupakan salah satu negara yang memiliki arti penting dalam pengelolaan perbatasan, terutama dalam hal administrasi wilayah yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Wilayah Perbatasan yang terletak di Wilayah Papua atau di provinsi paling timur Indonesia ini sangat jarang dibicarakan dan sedikit diliput media. Selain keterpencilan dan akses transportasi yang terbatas, pertumbuhannya tertinggal dari tempat-tempat lain di Papua, karena berbagai faktor. Selain itu, karena situasi keamanan yang genting di daerah tersebut, studi tentang wilayah perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini, khususnya tentang fenomena lintas batas yang terjadi di sana, menjadi terbatas.

Wilayah Papua dan Papua Nugini menjadi salah satu hot spot perebutan wilayah di Asia Pasifik pada masa Perang Dunia II yang juga dikenal dengan Perang Pasifik, yang kemudian berlanjut ke Perang Dingin. Wilayah Papua dan Papua Nugini menjadi batu loncatan untuk menguasai pusat kekuasaan di Jepang dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina adalah contoh negara-negara di Asia

Pasifik. Sementara itu, wilayah Papua yang berada di persimpangan kawasan pasifik tetap vital, menarik perhatian negara adidaya sekaligus pemain regional.

Untuk saat ini dan di masa mendatang, kawasan ini perlu mendapat perhatian khusus dan signifikan karena minimnya kekayaan dan ekonomi di sepanjang perbatasan Indonesia-Papua Nugini yang saat ini masih tertinggal. Karena situasi ini, lebih banyak ancaman keamanan dapat muncul, yang pada gilirannya dapat mendorong munculnya gerakan pemisahan diri, yang dapat berimplikasi serius pada kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang pembangunan bangsanya belum tercapai. belum mencapai keadaan yang solid dan lengkap. Hal ini juga terkait dengan masalah kesejahteraan yang selama ini menjadi perhatian di daerah perbatasan yang belum sepenuhnya tertangani dan terobati. Tingkat kejahatan yang tinggi, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat pendapatan penduduk yang rendah, dan kelangkaan pekerjaan yang sesuai, semuanya merupakan akibat dari keadaan ekonomi dan sosial yang ada di sepanjang perbatasan dan di distrik-distrik tetangga.

Paradigma kesejahteraanlah yang mengatur paradigma pembangunan Indonesia saat ini, yang menggunakan strategi kesejahteraan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi di seluruh negeri, termasuk wilayah perbatasan. Karena pemekaran dan pembangunan sektor ekonomi menjadi fokus utama, maka perhatian yang dimajukan pada hakekatnya bersifat ekonomi. Secara alami, wilayah yang berkembang dan sukses adalah wilayah yang secara ekonomi memungkinkan untuk memperluas dan meningkatkan ekonomi. Itulah salah satu alasan mengapa kota-kota di pulau Jawa telah berkembang lebih jauh dalam pembangunan daripada di lokasi lain. Lokasi terpencil dengan sedikit atau tanpa penduduk akan terhindar dari dampak pembangunan. Demikian pula daerah perbatasan seringkali jauh, berpenduduk sedikit, dan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas rendah. Pembangunan kawasan perbatasan tentu saja tidak ekonomis dan tidak diinginkan jika dilihat dari segi ekonomi. Hal

ini menjadi penyebab daerah perbatasan semakin terisolir dan terabaikan.

Pentingnya kearifan lokal dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) di kawasan perbatasan juga harus diperhatikan, karena menjadi landasan untuk mengembangkan model pengembangan masyarakat yang tepat, khususnya di kawasan perbatasan Indonesia-Papua Nugini, dan harus dipertimbangkan. Terlepas dari kenyataan bahwa ada beberapa disparitas antara satu daerah dengan daerah lain di wilayah perbatasan, mereka semua memiliki satu kesamaan dalam hal kegiatan ekonomi: semuanya didasarkan pada ekonomi sub-sistem. Di sekitar perbatasan Indonesia-Papua Nugini terdapat pemukiman Skow di Indonesia dan Wutung di Papua Nugini, yang keduanya terletak dekat dengan perbatasan kedua negara. Dusun Jayapura - Skow sangat berbeda dengan desa-desa lain di Papua. Anda mungkin mengklaim bahwa pemukiman ini berfungsi sebagai perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini, dan memang demikian. Pemukiman Skow dapat diakses dengan mobil dalam waktu sekitar 2 jam dari Jayapura. Di Papua Nugini, pemukiman ini terletak di seberang jalan dari Desa Wutung. Ada bagian tanah yang menjadi batas antara negara dan negara tetangga, dan hanya dibatasi oleh pagar berantai.

Meski dekat dengan Indonesia, wilayah tersebut kini menjadi milik Papua Nugini dan bukan Indonesia. Setelah hanya beberapa langkah singkat dari penghalang, kita mungkin sudah berada di negara lain. Saat berada di Skow Village, wisatawan dapat melihat-lihat pemandangan, termasuk perbatasan, serta pilihan makanan dan minuman yang, jika Anda perhatikan baik-baik, ditandai 'Made in Papua Nugini.' Minuman seperti soft drink atau bir, misalnya. Produk di Skow Village tampaknya tidak hanya datang dari Indonesia, tetapi juga dari negara tetangga, seperti Papua Nugini, menurut penduduk setempat. Akibatnya, penyelesaian ini secara sah dapat dianggap sebagai zona bebas antara dua negara. Selain itu, banyak barang-barang buatan Papua Nugini dapat diperoleh di pasar desa, yang hanya buka pada hari-hari ketika pasar sedang berlangsung. Hari pasar ini adalah

kesempatan satu-satunya untuk perdagangan, yang sering disediakan untuk akhir pekan. Tentu saja, barang-barang yang diproduksi di dalam negeri juga dipertukarkan di pasar. Barang-barang yang ditawarkan kebanyakan adalah kebutuhan penduduk setempat, mulai dari pakaian hingga gadget. Orang-orang dari Desa Skow, serta penduduk Desa Wutung di dekatnya di Papua Nugini, datang ke pasar untuk membeli produk segar. Mereka datang untuk memeriahkan suasana pasar (JAHI, vol. 3no. 1)

Menurut latar belakang di atas kondisi sosial ekonomi masyarakat di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini 2019-2020 memiliki banyak permasalahan-permasalahan. dimana permasalahan sosial ekonomi masyarakat di perbatasan ini sangat berpengaruh dalam perkembangan kemajuan negara Indonesia dan Papua Nugini. Sehingga membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : *“kondisi sosial ekonomi masyarakat di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini 2019-2020*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia dan Papua Nugini di perbatasan pada tahun 2019-2020?
- 1.2.2. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dan Papua Nugini dalam menangani kondisi sosial ekonomi di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini pada tahun 2019-2020

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

- 1.3.1. Untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia dan Papua Nugini di perbatasan pada tahun 2019-2020
- 1.3.2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Papua

Nugini dalam menghadapi keadaan sosial ekonomi di sepanjang perbatasan Indonesia dan Papua Nugini pada tahun anggaran 2019-2020,

1.4 Manfaat Penelitian

Jika semuanya berjalan sesuai rencana, temuan penelitian ini akan bermanfaat bagi penulis serta orang lain yang ingin menggunakannya sebagai bahan referensi untuk penelitian tambahan, baik secara teoritis maupun praktis, di masa mendatang.

1.4.1. Manfaat Teoretis

- a. Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan menawarkan peneliti dengan insentif untuk melanjutkan studi mereka.
- b. Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang situasi sosial ekonomi individu yang tinggal di perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini pada tahun ajaran 2019-2020.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Peneliti selanjutnya yang ingin meningkatkan kesadaran tentang situasi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini pada tahun 2019-2020 dapat menggunakan laporan ini sebagai sumber daya.
- b. Tingkatkan pengetahuan pembaca tentang situasi sosial-ekonomi yang berubah dari individu yang tinggal di kedua negara yang sedang diperiksa dengan memberi mereka lebih banyak informasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Umum Tentang Indonesia

Republik Indonesia, terletak di Asia Tenggara, adalah republik kepulauan terbesar di dunia dan negara kepulauan terbesar di dunia. Jarak antara benua Asia dan Australia, serta jarak antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, diukur dalam derajat garis lintang di garis khatulistiwa. Indonesia dikelilingi oleh Malaysia di sebelah utara pulau Kalimantan, Papua Nugini di sebelah timur pulau Papua, dan Timor Leste di sebelah utara pulau Timor. Indonesia juga dibatasi oleh Samudra Pasifik di sebelah utara pulau Timor. Indonesia memiliki lebih dari 18.000 pulau (sekitar 6000 di antaranya kosong) yang tersebar di sekitar khatulistiwa, yang semuanya beriklim tropis dan menyediakan cuaca tropis. Pulau Jawa, yang berisi setengah dari populasi Indonesia, adalah pulau terpadat di negara itu. Indonesia terdiri dari lima pulau utama, yang masing-masing diberi nama Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Letak geografis Indonesia yang berada di atas lempeng tektonik membuat Indonesia sering dilanda gempa bumi yang berpotensi menimbulkan tsunami. Indonesia juga merupakan rumah bagi beberapa gunung berapi, yang paling terkenal adalah Krakatau, yang terletak di antara pulau Sumatera dan Jawa dan meletus pada tahun 1883. Masyarakat Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua divisi, secara garis besar. Penduduk Indonesia sebagian besar adalah Austronesia di bagian barat

negara itu, dan Melanesia di bagian timur.

Indonesia dikelilingi oleh dua benua dan dua laut di tiga sisinya. Pasalnya, Indonesia memiliki perbatasan darat dan laut langsung dengan sejumlah negara tetangga, antara lain perbatasan laut dengan Australia dan Filipina, India, Malaysia, Singapura, Timor Leste, Thailand, dan Vietnam. Abad XIV dan awal abad XV melihat pembentukan lima zona ekonomi di Asia Tenggara, menurut Hall. Zona pertama adalah zona Teluk Benggala, yang meliputi India Selatan, Ceylon, Burma, dan pantai utara Sumatera. Zona kedua adalah zona Samudera Hindia. Wilayah kedua adalah wilayah Malaka. Wilayah ketiga adalah wilayah Laut Cina Selatan, yang meliputi pantai timur Semenanjung Malaysia, Thailand, dan Vietnam selatan, di antara negara-negara lain. Terakhir, wilayah Sulu, yang meliputi Pantai Barat, Luzon, Mindoro, Cebu, Mindanao, dan Pantai Utara Kalimantan, dibagi menjadi empat bagian. Wilayah kelima adalah wilayah Laut Jawa. Karena perdagangan rempah-rempah, gaharu, beras dan komoditas lainnya antara barat dan timur, wilayah Laut Jawa berkembang, yang meliputi Kalimantan Selatan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Nusa Tenggara(K.R. Hall.1985 : 20-25).

Untuk memperlancar perdagangan dan transportasi, wilayah Laut Jawa sudah terhubung dengan baik sebelumnya dengan pintu masuk orang Eropa dan penjajah lainnya. Bukan hanya Laut Utama Indonesia, tetapi juga Laut Inti Asia Tenggara, hal ini terlihat dari letaknya yang berada di dalamnya. (V.J.H. Houben dkk, 1992, 1988, 1993: 45.) Sebagai pusat peradaban dan bekas kemegahan, kepulauan Indonesia telah terkenal sejak zaman kuno. Pada tahun 2008, Lombard dan rekan-rekannya menerbitkan sebuah makalah berjudul Indonesia telah dijuluki "tempat lahirnya peradaban global," menurut Arysio Santos, yang mengklaim telah menemukan bukti untuk gagasan ini setelah 30 tahun penyelidikan (Arsyo Santoso. 2010 :549-ff). Sarjana lain, Stephan Oppenheimer, menemukan bahwa Indonesia dan Asia Tenggara dianggap sebagai tempat lahirnya peradaban kuno dalam studinya.

Oppenheimer (2010) mendefinisikan diformalkan diformalkan Jimly Asshiddique menulis sebagai berikut dalam menanggapi penelitian ini:

Baik dalam penelitian Stephen Oppenheimer maupun Arsyo Santoso dan kawan-kawan, tergambar bahwa bangsa yang sekarang menyatakan dirinya sebagai bangsa Indonesia sesungguhnya telah memiliki sejarah yang sangat panjang di masa pra sejarah. Sejarah Indonesia tidak hanya dimulai dengan sejarah kerajaan kecil di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Meskipun sejak masa Kerajaan Sriwijaya yang dikenal sebagai Kerajaan maritim yang disegani di dunia, tetapi sejak jauh sebelumnya, di kawasan nusantara ini telah tumbuh dan berkembang suatu peradaban besar dalam sejarah umat manusia di masa lalu, yang kemudian dikenal sebagai legenda tentang Benua Atlantis atau Edan (surga) di kawasan Timur (Asshiddique : 5).

Para peneliti dapat menyimpulkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan populasi orang, bahasa, dan suku yang beragam, yang semuanya berbicara dalam berbagai bahasa. Ada pulau-pulau besar yang sepi dan pulau-pulau kecil tak berpenghuni di Samudra Pasifik. Perbatasan darat, laut, dan udara memisahkan negara Indonesia dari negara-negara sekitarnya, dan perbatasan antara Indonesia dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini yang masih relatif sepi dalam hal mempertahankan wilayah perbatasannya, juga hadiah. masing-masing dilihat dari perspektif perdamaian negara-negara yang berdekatan.

2.2. Konsep Umum Tentang Papua Nugini

Papua Nugini, juga dikenal sebagai Papua Nugini, adalah sebuah negara yang terletak di bagian timur pulau Papua, di sebelah barat berbatasan dengan provinsi Papua (Indonesia), dan di sebelah timur dengan pulau New Guinea. Di selatan, ada benua Australia, dan di selatan, timur, dan utara, ada negara-negara Oceania. Port Moresby, ibu kota negara dan salah satu kota utamanya, adalah kota terbesar di negara ini. Selain

memiliki lebih dari 850 bahasa lokal asli dan setidaknya pemukiman kecil sebanyak penduduk yang tinggal di dalamnya, Papua Nugini memiliki populasi tidak lebih dari 6 juta orang, menjadikannya salah satu negara paling beragam di planet ini. . Sebagai salah satu negara dengan wilayah pemukiman terbesar, Papua Nugini juga merupakan salah satu yang terpadat. Dengan hanya 18 persen dari populasi yang tinggal di wilayah metropolitan, ini adalah tugas yang menantang. Negara ini adalah salah satu negara yang paling sedikit dieksplorasi di dunia, baik secara budaya maupun geografis, dan diyakini bahwa banyak spesies flora dan hewan yang tidak diketahui berada di jantung hutan hujan Papua Nugini.

Pulau Papua / Pulau Nugini (New Guinea) adalah nama yang diberikan untuk pulau terbesar kedua di dunia, yang terletak di Samudera Pasifik. Jelas bagi kita yang tinggal di Indonesia, pulau berbentuk burung ini bukanlah tempat yang asing. Karena di pulau ini terletak Provinsi Papua dan Papua Barat yang merupakan dua provinsi di Indonesia yang paling timur dari segi letak. Jika kita melangkah lebih jauh ke timur, kita akan menjumpai sebuah negara bernama Papua Nugini (Papua New Guinea), yang merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia yang memiliki perbatasan darat dengan bangsa Indonesia di Indonesia. Papua Nugini, meskipun ukurannya jauh lebih kecil dari Indonesia, tidak dapat dianggap sebagai negara kecil dalam konteks wilayah sekitarnya karena letak geografisnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Papua Nugini adalah negara terpadat kedua di Oseania, setelah Australia. Meskipun ada banyak persamaan antara Papua Nugini dan Australia, kesamaan tidak berakhir di situ. Baik Australia dan Papua Nugini dianggap sebagai negara Persemakmuran Inggris, yang berarti mereka memiliki kedudukan hukum yang sama dengan Inggris. Hal ini sangat wajar bila Anda menyadari bahwa kedua negara tersebut dulunya berada di bawah kekuasaan Inggris(<https://www.abc.net.au/news/2015-09-16/timeline-of-papua-new-guinea-road-to-independence/6748374>).

Inggris bukanlah negara Eropa pertama yang menginjakkan kaki di pendahulu Papua Nugini. Prancislah yang pertama. Itu adalah kompi pelaut Portugis yang dipimpin oleh Jorge de Meneses yang merupakan orang Eropa pertama yang menginjakkan kaki di pulau New Guinea pada tahun 1488. Meneses sendiri sedang dalam perjalanan ke Kepulauan Maluku pada saat itu, dan diyakini bahwa dia berhenti sejenak. di bagian barat Pulau Papua antara tahun 1526 dan 1527 dalam perjalanannya ke sana. Meneses kemudian membaptis pulau itu dengan nama yang dia temukan, "Ilhas dos Papuas." Nama ini berasal dari frase Portugis "negara orang dengan rambut keriting." Seorang penjelajah dari Spanyol bernama Inigo Ortiz de Retes memulai ekspedisi ke pantai utara pulau Papua pada tahun 1546, dan dia adalah salah satu orang Eropa pertama yang melakukannya. Setelah itu, dia menamai pulau yang dia jelajahi "Nueva Guinea" (New Guinea) karena, menurutnya, tampilan penduduk Pulau Papua mirip dengan penampilan penduduk Guinea, yang merupakan wilayah di Afrika barat. .

Pada tahun 1767, pasukan pelaut Inggris di bawah komando Philip Carteret berangkat menuju pulau-pulau di sebelah timur Pulau Papua untuk mencari wilayah baru. Dia kemudian memberi dua pulau terbesar gelar masing-masing "Britania Baru" (Britania Baru) dan "Irlandia Baru" (Irlandia Baru), (Irlandia Baru). Itu pada tahun 1828 ketika Belanda mengklaim kedaulatan atas bagian barat Pulau Papua sebagai milik mereka. Karena lepasnya klaim Belanda, hanya bagian timur pulau Papua yang dianggap sebagai pendahulu wilayah Papua Nugini, yang masih berpeluang diperintah oleh negara-negara Eropa lainnya. Akibatnya, selama dekade 1870-an, armada Inggris yang dipimpin oleh Kapten John Moresby berangkat untuk menyelidiki pantai selatan Pulau Papua, yang mereka temukan. Akibatnya, nama "Moresby" diterapkan ke kota Port Moresby, yang terletak di pantai selatan Pulau Papua dan pada akhirnya akan menjadi ibu kota Papua Nugini(<https://www.bbc.com/news/world-asia-15593238>)

Menurut peneliti, Papua Nugini (juga dikenal sebagai Papua Nugini) adalah sebuah negara yang terletak di bagian timur pulau Papua, dengan batas darat dengan provinsi Papua di Indonesia, dan ibu kota Port Moresby. Papua Nugini adalah salah satu negara paling berbeda di planet ini, dengan beberapa bahasa daerah dan sumber daya manusia berjumlah 6 juta orang. Ini juga memiliki desa yang sangat luas, menjadikannya salah satu negara paling beragam di planet ini. Papua Nugini, setelah Australia, adalah negara terbesar kedua di dunia dan negara terbesar kedua di Oseania. Papua Nugini sendiri adalah bekas jajahan Inggris atau pernah di bawah kekuasaan Inggris pada satu titik dalam sejarahnya. Dinamakan Port Moresby setelah Kapten John Moresby, kapten armada Inggris yang tiba di Papua Nugini pada tahun 1819. Ibu kotanya Papua Nugini juga disebut Port Moresby.

2.3. Perbatasan Antar Negara

2.3.1. Definisi Perbatasan

Setiap negara menempati lokasi geografis tertentu di planet ini dan memiliki batas-batas tertentu. Kekuasaan negara meluas ke seluruh wilayah, termasuk tidak hanya tanah tetapi juga air di sekitarnya dan langit di atasnya. Sebuah negara dengan wilayah daratan yang luas dihadapkan pada berbagai bahaya, salah satunya adalah keberadaan berbagai suku, ras, dan tradisi agama. Pertimbangan geografis, serta batas-batas nasional dan internasional, memberikan tantangan. Misalnya, apakah perbatasan itu batas alam, apakah negara itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan laut (yaitu, terkurung daratan), atau apakah ada masalah tambahan yang terjadi akibat keberadaan perbatasan. (Miriam B. 2008 : hlm. 51).

Saat ini, ada beberapa persoalan perbatasan, antara lain batas darat dan laut, serta klaim kedaulatan yang masih menjadi perdebatan antara satu pemerintah dengan pemerintah lainnya. Memang, banyak isu yang muncul saat ini sedang ditangani melalui jalur

diplomasi, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa isu-isu ini dapat meningkat menjadi konfrontasi yang berlarut-larut di masa depan. Ketika diplomasi gagal, perang adalah alternatif terakhir, karena perang adalah salah satu senjata kebijakan luar negeri yang tersedia untuk melindungi kepentingan nasional ketika tindakan damai untuk melindungi kepentingan nasional tidak efektif. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa masalah perbatasan menimbulkan bahaya bagi perdamaian dan keamanan baik di tingkat nasional maupun internasional(<http://neetataky.blogspot.com/2011/05/definisi-definisi-diplomasi.html>, diakses pada tanggal 24 Desember 2011).

Seperti yang didefinisikan oleh Arya Damarjana, kata "perbatasan" erat kaitannya dengan gagasan "negara", di mana negara didefinisikan sebagai entitas teritorial yang berdaulat (atau otonom) terhadap tetangganya. Mengingat hukum adat/adat telah bertransisi menjadi hukum daerah dari perspektif status negara, keduanya memiliki pandangan dasar yang sama, yaitu bahwa entitas wilayah dengan warga negara dan pemerintah yang memiliki kontrol internal yang efektif, independen dari pengaruh eksternal, serta kemauan dan kemampuan untuk memikul kewajiban mereka berdasarkan aturan dan hukum internasional (atau federal) telah ditetapkan. Sebagai suatu wilayah, kedaulatan harus memiliki batas-batas tertentu, dan sebagai suatu wilayah, kedaulatan diartikan sebagai suatu wilayah yang kewenangannya dibatasi secara ketat oleh batas-batas negara. Perbatasan menyatukan wilayah dan masyarakat yang hidup di bawah satu pemerintahan dan hukum yang berdaulat, dan yang setidaknya terkait secara administratif dan ekonomi, jika bukan konsep bangsa itu sendiri. Akibatnya, dalam hal ini, negara adalah alat utama yang bertanggung jawab atas batas-batas yang menentukan kedaulatannya. Hal ini tidak lepas dari perjanjian Westphalia yang menjadi titik awal terbentuknya "negara" dalam bentuknya yang sekarang. Dalam situasi dimana kedaulatan suatu negara tidak akan lepas dari pengertian kebangsaan dan batas-batasnya. itu sendiri, yang dianggap diberikan sejak awal(Arya D, Vol 3-No.1/2014-

03).

Karena perbatasan merupakan lokasi yang kritis, maka fungsi aparat keamanan dan badan pengawas perbatasan menjadi sangat krusial di kawasan ini. Dalam menjaga pertahanan negara, TNI merupakan komponen utama, dan perbatasan merupakan salah satu pintu masuknya, sehingga TNI juga bertanggung jawab menjaga garis perbatasan. Selain itu, TNI dibantu oleh POLRI, yang bertanggung jawab menjaga keamanan nasional di seluruh negeri. Peran pemerintah daerah yang diwakili oleh Badan Pengelola Perbatasan sama pentingnya dalam mendukung kedua layanan keamanan tersebut. Selain itu, Bea dan Cukai yang bertugas memeriksa dokumen barang, membantu Imigrasi, yaitu departemen yang bertugas memeriksa dokumen bagi pelintas batas. BNN ditetapkan sebagai organisasi yang menangani masalah narkoba karena penyelundupan narkoba adalah salah satu masalah keamanan paling serius di perbatasan. Meskipun masing-masing instansi dan aparat keamanan memiliki tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing, namun mereka semua secara bersama-sama bertanggung jawab atas keamanan perbatasan, karena wilayah perbatasan merupakan wilayah vital yang dapat berdampak pada perekonomian, politik, dan bahkan kehidupan suatu negara. keamanan dan pertahanan(Sekretariat Kabinet RI, 2017).

Berdasarkan beberapa teori yang dikemukakan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa perbatasan adalah suatu tempat dimana batas-batas antar negara satu sama lain, baik dari segi wilayah, warga negara, maupun pemerintah yang secara efektif mengontrol secara internal, bebas secara eksternal dan internal, termasuk sosial. , masalah ekonomi, budaya, dan keamanan, yang kesemuanya memiliki undang-undang dan peraturan sendiri dalam batas wilayah negara masing-masing.

2.3.2 Perbatasan Indonesia-Papua Nugini

Dalam konteks hubungan internasional, perbatasan merupakan titik pertemuan dua

negara atau lebih yang berfungsi sebagai batas kedaulatan masing-masing negara. Karena posisi fisik perbatasan ini, banyak spekulasi tentang elemen sosial budaya, politik, dan ekonomi dari hubungan kedua negara yang terlibat. Masalah perbatasan seringkali menjadi sumber kepekaan dan konflik dalam masyarakat internasional, yang mempengaruhi hubungan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Karena perbatasan kedua negara, ketidakpastian kedaulatan negara dapat diamati dengan jelas. Sebagian besar, Indonesia adalah negara yang berbatasan langsung dengan banyak negara lain. Indonesia berbatasan dengan berbagai negara tetangga, antara lain Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini, yang secara fisik berbatasan dengan Indonesia (selanjutnya disebut PNG). Menurut Haryati, semakin banyak batas suatu negara dengan negara lain, semakin sulit tantangan yang harus dihadapi negara tersebut (JAHI, Vol.3, No.1). Ketika kita berbicara tentang perbatasan, kita berbicara tentang Perbatasan Negara antara Indonesia dan Papua Nugini.

Indonesia memiliki perbatasan laut dan darat dengan Papua Nugini (PNG), dan kedua negara secara geografis berdekatan. Sesuai dengan Profil Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Papua, perbatasan antara Indonesia dan PNG melewati satu kota dan beberapa kabupaten di Provinsi Papua, antara lain Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Supiori Regimende, Merauke Regimende, dan Boven Digul Regimende, antara lain. Karena berfungsi sebagai pintu masuk bagi penduduk Papua Nugini untuk masuk ke Indonesia, perbatasan merupakan sektor penting yang strategis yang mungkin memiliki konsekuensi menguntungkan dan juga buruk bagi negara. Bahkan kedaulatan dan keamanan negara diabadikan di dalam wilayah tersebut. Selain itu, karena mencakup dua negara, kesulitan di perbatasan mungkin rumit, termasuk masalah seperti administrasi perbatasan serta masalah keamanan seperti penyelundupan narkoba, penyelundupan manusia, dan bentuk penyelundupan lainnya.

Penyeberangan perbatasan Skouw, Jayapura adalah yang paling populer karena

Pasar Batas dan kemudahan yang dapat dicapai melalui darat dari Vanimo dan berbagai desa terdekat, serta sebaliknya. Pembentukan pasar perbatasan memiliki pengaruh yang baik di Indonesia karena membantu meningkatkan situasi ekonomi mereka yang tinggal di sepanjang perbatasan dengan negara tersebut. Tidak dapat dielakkan dampak negatif dari tingginya angka lintas batas yang menimbulkan masalah keamanan berupa kejahatan lintas negara seperti penyelundupan narkoba, perdagangan senjata api dan senjata tajam secara ilegal, imigrasi orang secara ilegal atau penyeberangan perbatasan secara ilegal, penyelundupan bahan bakar minyak, dan bentuk-bentuk imigrasi ilegal lainnya.

Program Presiden Jokowi meliputi pembangunan kawasan Pos Lintas Batas (PBLN) di Skouw yang telah dibangun sejak November 2015 dan selesai pada Desember 2016. Program pembangunan PBLN Skouw dilakukan sesuai dengan tujuan Presiden Jokowi tanpa mengganggu kinerja aparat keamanan dan instansi perbatasan, seperti TNI dan POLRI, Bea Cukai, BNN, dan Departemen Imigrasi. Hal ini ditunjukkan dengan efektifitas taktik pengamanan yang baik, seperti proses penangkapan terhadap para penyelundup berbagai jenis ganja. Terutama menonjol dalam lima tahun terakhir, dari 2012 hingga 2016. Jumlah pengunjung Skouw meningkat pada 2016, setelah selesainya proses pembangunan, dengan orang-orang datang dari Jayapura dan Papua Nugini (Sekertariat Kabinet RI, 2017).

2.4. Kondisi Sosial Ekonomi

Status sosial ekonomi setiap orang adalah unik dan bertingkat; ada orang-orang yang berada dalam situasi sosial ekonomi tinggi, sedang, dan miskin, dan ada pula yang berada di antara keduanya. Menurut Abdulsyani (1994), status sosial ekonomi didefinisikan sebagai tempat atau kedudukan seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis kegiatan ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, usia, tempat tinggal, dan kekayaan yang dimiliki.

Menurut Abdulsyani (1994), dalam kajian Maftukhah (2007), kedudukan sosial

ekonomi diartikan sebagai tempat atau kedudukan seseorang dalam suatu kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis kegiatan ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, umur, jenis tempat tinggal, dan kekayaan yang dimiliki. Dalam konteks penelitian ini, istilah "keadaan sosial" dan "kondisi ekonomi" didefinisikan sebagai berikut:

- a. Kondisi sosial adalah latar belakang suatu keluarga yang dipandang dari umur dan tingkat pendidikan orangtua,
- b. Kondisi ekonomi adalah latar belakang suatu keluarga dipandang dari pendapatan keluarga, pengeluaran keluarga, dan kekayaan yang dimilikinya.

Seperti yang didefinisikan oleh Soerjono Soekanto (2001), status sosial ekonomi mengacu pada tempat seseorang dalam masyarakat dalam hubungannya dengan individu lain dalam hal lingkungan sosial, prestasi, serta hak dan kewajiban sehubungan dengan sumber daya, antara lain. Bintarto (1977) dalam Fandi mendefinisikan pengertian kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai upaya kolektif anggota masyarakat untuk mengatasi atau mengurangi kesulitan hidup. Ada lima parameter yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi sosial ekonomi masyarakat, yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan tingkat pendapatan yang diperoleh.

Berdasarkan beberapa hipotesis tentang situasi sosial ekonomi yang dibahas di atas. Pada akhirnya, peneliti berpendapat bahwa keadaan sosial ekonomi adalah posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat dalam kaitannya dengan tingkat pendidikan, usia individu, tingkat pendapatan, kepemilikan aset dan jenis tempat tinggal.

2.4.1. Pengertian Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "sosial" mengacu pada segala sesuatu yang ada hubungannya dengan masyarakat (KBBI, 2002:1454). Menurut Kementerian Sosial, istilah "sosial" mengacu pada segala sesuatu yang dijadikan acuan dalam berinteraksi antar manusia dalam konteks bermasyarakat atau bermasyarakat. Istilah

"sosial" mengacu pada sesuatu yang abstrak yang mengandung simbol-simbol yang berkaitan dengan pemahaman lingkungan, dan berfungsi untuk mengatur tindakan yang dimunculkan oleh masyarakat, menurut Kementerian Sosial. Individu dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat Akibatnya, masyarakat harus berisi lebih dari satu manusia yang terkait dengan satu kesatuan interaksi, karena termasuk lebih dari satu individu menyiratkan bahwa setiap individu yang berfungsi dengan yang lain memiliki hak dan kewajiban yang sama. berbeda satu sama lain(<http://www.depsos.go.id/> diakses pada tanggal 1 Desember 2016).

Beberapa peneliti, termasuk Enda (2010), mendefinisikan sosial sebagai metode di mana orang terhubung satu sama lain. Sedangkan sosial menurut Daryanto (1998), adalah sesuatu yang menyangkut unsur-unsur kehidupan masyarakat pada umumnya. Jika dilihat dari asal muasal istilah, sosial berasal dari kata latin "socius" yang berarti "segala sesuatu yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bersama".

Sebagai hasil dari banyak pandangan yang dibahas di atas, peneliti menemukan bahwa sosial didefinisikan sebagai interaksi antara orang-orang yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan sosial.

2.4.2 Pengertian Ekonomi

Yang dimaksud dengan "ekonomi" adalah suatu bidang ilmu sosial yang mempelajari kesejahteraan manusia dan masyarakat; Secara etimologis, kata "ekonomi" dapat diturunkan dari dua suku kata Yunani, yaitu oikos dan nomos, yang berarti "pemerintahan rumah" dan "kesejahteraan sosial" (Rosyidi, 2009:5). Rosyidi (2009:7) memberikan gambaran ekonomi berikut untuk memberikan gambaran lengkap tentang apa itu:

Menurut Wikipedia, "ekonomi adalah disiplin studi yang bercita-cita untuk

memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang gejala masyarakat yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan manusia yang diambil dalam upaya untuk memenuhi keinginan mereka atau mencapai kekayaan." Lebih lanjut kita dapat melihat definisi lain seperti yang diungkap Silk (dalam Rosyidi, 2009:27) :

“Ekonomi adalah studi tentang kekayaan, dan merupakan aspek penting dari penyelidikan ilmiah tentang sifat manusia. Hal ini disebabkan oleh karakter manusia, yang telah dibentuk oleh pekerjaan sehari-hari mereka serta sumber daya material yang mereka miliki”

Dari semua teori yang dikemukakan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang individu dan masyarakat yang mengkaji pemenuhan kebutuhan individu dan masyarakat, yang terdiri dari berbagai hierarki kebutuhan dan keinginan masyarakat, dimana dari konsep di atas menghasilkan beberapa unsur-unsur yang mendukung konsep tersebut, namun jika ditelaah secara bersama-sama, semuanya mengacu pada konsep kemampuan untuk mengakses pemenuhan tingkat kebutuhan dan keinginan manusia yang mengarah pada pembangunan dan kemajuan yang berkelanjutan. Aspek-aspek yang berkontribusi terhadap pemenuhan persyaratan tersebut termasuk dalam item indikator yang digunakan untuk menentukan status ekonomi seseorang dalam masyarakat.

2.5. Pengertian Masyarakat

Organisasi orang-orang yang tinggal di lokasi tertentu, berinteraksi satu sama lain dalam jangka waktu yang lama, mengikuti praktik dan hukum tertentu, dan dari waktu ke waktu membangun budaya didefinisikan sebagai berikut: masyarakat Masyarakat juga merupakan sistem, terdiri dari sejumlah komponen struktur sosial, seperti: keluarga, ekonomi, pemerintah, lembaga keagamaan, dan lembaga pendidikan, serta strata sosial, yang

kesemuanya saling berhubungan dan bergantung satu sama lain serta dengan komponen struktur sosial lainnya (Jabrohim, 2004: 167).

Para penulis Soekanto berpendapat bahwa masyarakat adalah sistem konvensi dan proses, sistem kekuasaan dan kolaborasi di antara kelompok-kelompok yang beragam, dan sistem untuk mengkategorikan dan mengatur perilaku manusia serta kebebasan, antara lain. Totalitas yang terus berubah inilah yang kita sebut masyarakat. Masyarakat terdiri dari jaringan hubungan sosial, dan masyarakat selalu berkembang (Soekanto, 2007: 22).

Sentimen masyarakat terdiri dari tiga aspek, menurut Mac Iver dan Charles dalam Soekanto: merasakan, berbagi, dan mengandalkan satu sama lain; sedangkan jenis masyarakat terdiri dari empat kriteria, menurut Kingley Davis dalam Soekanto (2007: 134-135), yaitu sebagai berikut:

- 1). Jumlah penduduk.
- 2). Luas, kekayaan dan kepadatan penduduk daerah pedalaman.
- 3). Fungsi-fungsi khusus masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat
- 4). Organisasi masyarakat yang bersangkutan.

Secara umum, masyarakat adalah kumpulan individu yang memiliki identitas yang sama yang bekerja bersama secara terorganisir untuk melaksanakan semua tugas yang diperlukan untuk hidup dalam damai. Yang dipertimbangkan adalah tiga jenis kualitas yang membedakan komunitas dari kelompok lain:

- 1). Pada masyarakat pasti terdapat sekumpulan individu- individu yang jumlahnya cukup besar.
- 2). Individu tersebut mempunyai hubungan yang melahirkan kerjasama diantara mereka.
- 3). Hubungan individu-individu sedikit banyak harus permanen sifatnya (Faisal, 1980: 27).

Berdasarkan beberapa teori yang dikemukakan di atas, peneliti menyimpulkan

bahwa masyarakat adalah sekelompok individu yang memiliki tempat tinggal yang sama dan saling bekerja sama dalam melakukan tugas-tugas yang memerlukan kerja sama. Masyarakat juga memiliki adat, budaya, dan aturan tertentu yang dirancang untuk diikuti dalam lingkungan tertentu. hunian, dengan harapan kenyamanan bersama sebagai tujuannya.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara *library research* atau kepustakaan dengan pendekatan Historis. Menurut Mestika Zet penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian dengan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Berdasarkan pendapat dari Mestika Zet, Penelitian kepustakaan ini memiliki tiga ciri utama yaitu :

1. Peneliti berhadapan langsung atau melihat langsung dengan teks atau data angka, bukan lagi berhadapan dengan data yang ada dilapangan atau saksi mata berupa kajian, orang atau benda-bendalaninnya.
2. Kedua, peneliti berhadapan langsung dengan data yang siap pakai. Artinya peneliti tidak perlu pergi lagi mencari informasi yang lain kesana kemari, karena data yang diperlukan dapat dicari dan berhadapan langsung dengan sumber yang telah tersedia diperpustakaan.
3. Data yang diperoleh peneliti merupakan bahan dari tangan pihak kedua dan bukan data orisinil dari tangan pertama dilapangan.
4. Data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu (Mestika Zet.2004:4-5).

Berdasarkan pendapat diatas, Peniliti berkesimpulan bahwa jenis dan pendekatan penilitian ini dapat dilakukan dengan cara melihat langsung teks atau data yang siap pakai , bukan suatu data yang petama melainkan data ini diperoleh dari pihak kedua yang tidak dibatasi ruang dan waktu.

3.2. Metode Historis

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menggunakan metode historis. Dimana metode ini mempunyai fungsi untuk merekonstruksi informasi kejadian di masa lampau secara sistematis dan obyektif. Melalui cara pengumpulan data, menilai, membuktikan dan mensintesis bukti lapangan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yang kuat dalam hubungan hipotesis. Dalam metode Historis ini terdapat heuristic, kritik, interpretasi dan historiografi. Maka untuk mengumpulkan data penelitian ini menggunakan teknik studipustaka. Saat melakukan penelitian dengan metode historis ini perlu diperhatikan beberapa langkah seperti yang disebutkan diparagraf diatas. Dimana menurut Kuntowijoyo (dalam Priyadi S, 2012: 3) metode penelitian historis terdiri dari (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi (kritik internal dan eksternal), (4) interpretasi (analisis dan sintesis), (5) penulisan, sedangkan menurut Susanto dalam (Priyadi Sugeng, 2012: 3) meliputi (1) heuristik (mencari sumber-sumber), (2) kritik atau analisis (menilai sumber-sumber), (3) interpretasi atau sintesis (menafsirkan keterangan sumber-sumber), dan (4) historiografi (penulisan sejarah). Untuk memahami lebih jelasnya langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

1. Heuristik (pengumpulan sumber-sumber sejarah)

Tahap pertama dalam suatu penelitian sejarah adalah mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Proses pengumpulan sumber dalam penelitian sejarah dinamakan Heuristik. Menurut (Ismaun, 2005:49), heuristik yaitu pencarian dan pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan masalah yang akan diangkat oleh peneliti. Cara yang dilakukan adalah mencari dan mengumpulkan sumber, buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Secara sederhana sumber- sumber sejarah dapat berupa: sumber benda peninggalan, sumber tertulis dan sumber lisan. Secara lebih luas lagi, sumber sejarah dapat dibedakan kedalam sumber formal dan sumber informal. Selain itu, dapat diklasifikasikan

dalam sumber primer dan sumber sekunder.

Menurut G.J Reiner (dalam Abdurahman, 2007:64), heuristik adalah suatu teknik, suatu seni, dan bukan suatu ilmu. Oleh karena itu, heuristik tidak mempunyai peraturan-peraturan umum, sedangkan menurut (Helius S, 2012: 67) sebagai langkah awal ialah apa yang disebut heuristik (*heuristics*) atau dalam bahasa Jerman *Quellenkunde*, sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data atau materi sejarah, atau evidensi sejarah. Heuristik ini banyak menyita waktu, biaya, tenaga, pikiran, dan juga perasaan. Maka dari itu peneliti terlebih dahulu mengatur strategi, dimana dan bagaimana kita akan mendapatkan bahan-bahan tersebut: siapa-siapa atau instansi apa yang dapat kita hubungi; berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk perjalanan.

Dari beberapa teori di atas dapat diketahui bahwa pada tahap ini, peneliti melakukan pencarian, pengumpulan dan pengklasifikasian berbagai sumber yang berhubungan dengan topik penelitian. Untuk mengumpulkan sumber-sumber yang akan digunakan dalam penelitian ini peneliti tidak lupa untuk mencari beberapa buku, arsip, jurnal, dan referensi lainnya yang tentunya relevan dengan topik penelitian Proposal ini dan tentunya sumber-sumber yang dijadikan sebagai referensi peneliti diperoleh dari koleksi pribadi maupun dari tempat lain. Selain itu peneliti pun menggunakan artikel jurnal yang diperoleh dari pencarian di situs internet.

2. Kritik Sumber

Setelah melakukan pengumpulan dan membuat catatan-catatan penting dari sumber yang telah didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan kritik sumber. Tahap kritik sumber ini merupakan tahap untuk menentukan uji kelayakan sumber, apakah sumber tersebut dapat digunakan atau tidak dalam penelitian ini. Dalam metode sejarah untuk melakukan kritik dapat dilakukan dengan dua cara yaitu kritik Internal dan eksternal.

1. Kritik Internal

Kritik internal bertujuan untuk menguji reliabilitas dan kredibilitas sumber. Kritik ini mempersoalkan isi dari sumber sejarah. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Sugeng, (2012:67) bahwa pada tahap “Kritik internal” penulis melakukan penilaian terhadap sumber sejarah baik isi maupun bentuknya. Sehingga diperoleh fakta-fakta mengenai bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini.

2 Kritik Eksternal

Sebagaimana disarankan oleh istilahnya, kritik eksternal ialah melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek laur dari sumber sejarah. Sebelum semua sumber yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dapat digunakan untuk merekonstruksi masa lalu, maka terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan yang ketat (Helius S,2012:104).

Adapun yang dimaksud dengan kritik eksternal adalah uji kelayakan sumber-sumber sejarah yang akan dijadikan sebagai bahan penunjang dalam penelitian sejarah dengan melihat aspek-aspek luarnya, sebelum melihat isi dari sumber tersebut. Kritik eksternal juga dilakukan untuk meminimalisasi subjektivitas dari berbagai sumber yang telah didapatkan.

Dalam penelitian ini, sumber yang digunakan sebagai bahan penunjangnya adalah sumber yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini, ini merupakan sumber primer yang dijadikan bahan rujukan peneliti. Disamping itu juga penelitian ini didasarkan pada latar belakang pengarang dan waktu penulisan.

3. Interpretasi (menafsirkan sumber sejarah)

Interpretasi yaitu sebagai suatu usaha untuk memahami dan mencari keterhubungan antar fakta-fakta sejarah sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan rasional. Interpretasi ini juga sering disebut analisis sejarah. Menurut Kuntowijoyo (dalam

Abdurahman, 2007:73), analisis sejarah itu sendiri bertujuan melakukan sintesis atau sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta-fakta itu dalam suatu interpretasi yang menyeluruh.

Menurut Kartidirdjo (dalam Sugeng, 2012:71) dalam sejarah terdapat dua unsur yang penting, yaitu fakta sejarah dan penafsiran atau interpretasi. Jika tidak interpretasi, maka sejarah tidak lebih merupakan kronik, yaitu urutan peristiwa. Jika tidak ada fakta, maka sejarah tidak mungkin dibangun. Peneliti melakukan interpretasi atau penafsiran atas fakta-fakta sejarah yang terdiri dari *mentifact* (kejiwaan), *sosifact* (hubungan social), dan *artifact* (benda).

Pada tahap ini peneliti harus benar-benar teliti dalam melakukan penafsiran karena tahap ini merupakan suatu tahap akhir untuk menentukan keabsahan data ataupun keterkaitan fakta antara satu dengan yang lainnya yang sifatnya ilmiah untuk menuju penulisan sejarah.

4. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Tahap terakhir dari penelitian ini adalah menyajikan hasil penelitian. Pada tahap ini peneliti memaparkan dan melaporkan seluruh hasil penelitian dalam bentuk tulisan. Historiografi menurut Ismaun, (2005:28), “berarti pelukisan sejarah, gambaran sejarah tentang peristiwa yang terjadi pada waktu yang telah lalu”. Dalam tahap ini peneliti menceritakan, merekonstruksi peristiwa sejarah dari fakta-fakta yang di dapatkan setelah melakukan tahapan-tahapan sebelumnya, dari mulai pencarian data-data evidensi, pencatatan- pencatatan, kritik, sampai kepada tahap penyusunan atau penafsiran. Hal-hal yang didapat disertai dengan penafsiran-penafsirannya sehingga hasil dari historiografi berupa rekonstruksi dari peristiwa sejarah.

Maka pada tahap penulisan, peneliti melakukan penyusunan dan penuangan seluruh

hasil ke dalam bentuk tulisan dari Bab 1 hingga Bab 5, berdasarkan temuan-temuan dari sumber-sumber yang peneliti dapat dan kumpulkan, seleksi, analisis, dan rekonstruksi berdasarkan fakta-fakta yang sesuai dengan judul penelitian.

3.3. Batasan Temporal

Jika kita membahas tentang Kondisi Sosial Ekonomi di Perbatasan Indonesia dan Papua Nugini tidak akan cukup dengan satu judul saja, karena cangkupan untuk perkembangan Kondisi Sosial Ekonomi di Perbatasan sangat panjang tetapi peneliti akan membatasi cangkupan penelitian pada tahun yang di tentukan yaitu 2019-2020 saja karena dua tahun ini terlihat begitu besar peningkatan dari perkembangan di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini

3.4. Data dan Sumber Data

1.Data

Data adalah sesuatu yang dikumpulkan oleh peneliti berupa fakta empiris yang digunakan untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian (Siyoto dkk, 2015). Bahan sejarah yang hanya memerlukan pengelolaan, penyeleksian, dan pengategorikan sejumlah sumber yang tersedia pada dasarnya adalah variable yang membuka kemungkinan bagi peneliti sejarah untuk memperoleh pengetahuan tentang berbagai hal, disebut data (Abdurrahman, D. 2007:40).

Berdasarkan pendapat diatas, peneliti berkesimpulan bahwa Data adalah suatu bahan yang di kumpulkan dari bebagaimacam sumber yang fakta dan dipergunakan dalam memecahkan masalah, dilihat dari sejarah yang akan di ungkap dari penelitian seseorang.

2.Sumber Data

Segala sesuatu yang langsung atau tidak langsung memberitahu kepada masyarakat tentang sesuatu kenyataan atau kegiatan manusia pada masa lalu Syamsudin (dalam Syamsul. 2015:21). Sedangkan menurut Arikunto (2006:84) sumber data adalah subyek dari

mana data itu diperoleh.

Dalam penulisan penelitian digunakan sumber data tertulis, karena dengan data tertulis peneliti dapat memperoleh sumber penelitiannya. Sedangkan menurut Sugiyono, (2010:134) sumber data dalam penelitian ini adalah sumber yang diperoleh dari subjek selama melakukan penelitian, sumber data menurut sifatnya digolongkan menjadi dua jenis yaitu sumber data Primer dan sumber data sekunder.

3.5. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2014:226).

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman. Analisis Interaktif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Arikunto, 2006 :89).

1.Reduksi Data

Data yang telah di peroleh dari berbagai sumber tidak dapat dipungkiri jumlahnya cukup banyak sehingga disinilah peneliti dituntut untuk berusaha memilih dan memilah data secara teliti agar mendapatkan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam tahap selanjutnya.

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan informasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan dinamakan Reduksi Data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya(meringkas, menkode, menelusur tema, membuat gugus, membuat memo). Reduksi data ini

berlanjut terus menerus sampai laporan akhir lengkap tersusun.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah melakukan reduksi data, selanjutnya akan dilakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sebagainya. Miles dan Huberman (1992) menyatakan, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Miles dan Huberman membantu para peneliti kualitatif dengan model-model penyajian data yang analog dengan model-model penyajian data kualitatif statis, dengan menggunakan tabel, grafik, matriks dan sebagainya, bukan diisi dengan angka-angka melainkan dengan kata atau *Phaseverbal*.

3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam penelitian Kualitatif Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013:235) adalah dalam tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti baru yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti ilmiah yang disebut sebagai verifikasi data apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan kredibel.

3.6. Keabsahan Data

Keabsahan data penelitian dapat dilihat dari kemampuan menilai data dari aspek validitas dan reliabilitas data penelitian. Untuk menguji validitas penelitian dapat dilakukan dengan metode triangulasi dimana peneliti menemukan kesepahaman dengan subjek penelitian. Sedangkan reliabilitas dapat dilakukan dengan melakukan fieldnote atau catatan

lapangan dengan prosedur yang akan diterapkan (Sugiyono, 2010:65).

Demi mendapatkan keabsahan data, penulis melakukan beberapa diskusi dengan teman sejawat yang berkaitan dengan bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini, tetapi penulis mengkaitkan dengan perkembangan dari satu tahun sebelumnya sampai tahun sekarang (2019-2020) yang menjadi salah satu tonggak ukur kondisi sosial ekonomi di kedua negara tersebut . Penulis melakukan diskusi disaat waktu luang dengan teman-teman dan penulis mencari beberapa tambahan data dengan menonton beberapa Berita yang terkait dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi di kedua negara tersebut yang di siarkan melalui BBC NEWA Indonesia, Dokumen Kemendagri, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw perbatasan langsung dengan Papua Nugini (PNG).

